

# **Revitalisasi Posyandu Sinergitas Partisipasi Masyarakat dan Spirit Membangun Kesehatan Bangsa**

**oleh:**

dr. Nindy Handayani

Puskesmas Leuwisadeng, Kabupaten Bogor

Alumni FK UPN Veteran Jakarta Angkatan 2014

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Salah satu pelayanan dasar adalah posyandu, yang berperan sebagai wadah untuk pemantauan tumbuh kembang balita dan edukasi tentang gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, stunting, dan angka penyakit tidak menular. Posyandu berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya. Posyandu juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat edukatif dan partisipatif sebagai spirit membangun kesehatan bangsa. Posyandu diharapkan dapat melaksanakan fungsi dasarnya sebagai unit pemantau tumbuh kembang balita serta menyampaikan pesan kepada ibu serta ibu hamil sebagai salah satu yang berperan penting bagi kesehatan keluarga masing-masing. Oleh karena itu, posyandu sangat berperan sebagai penguat promosi kesehatan dengan memanfaatkan spirit gotong royong penduduk desa serta memberdayakan sekolah sebagai aspek penting pencegahan penyakit.

Menurut Laporan Kinerja Kemenkes tahun 2020, persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif mencapai target kurang dari 75% (kategori sulit tercapai) yaitu mencapai 6% (per tanggal 23 januari 2021) dari target 51%. Terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian target, di antaranya masyarakat belum sadar mengenai manfaat menimbang balita. Di samping itu, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti demam pasca imunisasi mengganggu kesehatan anak. Faktor lainnya adalah situasi pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah di Indonesia menjadi penghambat dalam melaksanakan program kesehatan seperti posyandu. Selain itu, mengingat peranan kader yang sangat penting, kualitas dan kuantitas kader yang tidak optimal juga dapat

mempengaruhi kegiatan posyandu sehingga revitalisasi posyandu sangat dibutuhkan dalam rangka optimalisasi peran posyandu.

Revitalisasi posyandu adalah upaya dalam meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu sehingga terciptanya kegiatan posyandu yang berkesinambungan. Proses revitalisasi posyandu dapat didukung dengan pendekatan pembangunan *enterpreunership*, mengingat posyandu dikembangkan sebagai bagian dari *social enterpreunership*. Program *enterpreunership* posyandu yang dapat dikembangkan yaitu pendidikan kesehatan, gizi, dan kesehatan lingkungan yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu. Dengan begitu, dalam mewujudkan revitalisasi posyandu dibutuhkan sinergitas partisipasi masyarakat dan spirit dalam membangun kesehatan bangsa.

Mekanisme dan peran Puskesmas sebagai FKTP menjadi acuan utama pemetaan situasi kesehatan sebagai tautan karakteristik pelayanan kesehatan dan ciri khas dari setiap daerah maupun regional. Melalui pola tersebut kebijakan kesehatan disusun berdasarkan peringkat prioritas kesehatan. Pemberdayaan Posyandu secara organisasi dikembangkan sebagai *center of excellent community health* melalui peningkatan kemampuan organisasi, kapabilitas dan kompetensi kader. Penguatan organisasi Posyandu yang sebelumnya berpola birokrasi, instruktif dan modelling terbatas dari Puskesmas dirubah menjadi modelling partisipatif berbasiskan kesehatan lingkungan.

Modelling partisipatif adalah suatu kekuatan nilai dan spirit yang dibangun dari kultur masyarakat setempat (nilai kebersamaan dan empati sosial) sebagai mata pisau yang tajam untuk mengurai tali tali atau sekat ego sektoral yang berada di daerah tersebut. Posyandu diharapkan menjadi wadah yang dapat mengakomodasi nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan aplikasi sosial yang berimbas kepada perubahan perilaku di masyarakat. Modelling ini juga menguak fenomena “organizing of change”, bagaimana Posyandu mendistribusi kekuatan organisasinya untuk menembus beberapa nilai perubahan yang belum menjadi kesepakatan sosial. Fungsi “organizing of change” dalam proses pendidikan dan pelatihan karakter kader Posyandu, memahami perannya yang tidak semata memberikan penyuluhan kesehatan, tetapi menggiring masyarakat untuk memiliki semangat sebagai agen penyuluh kesehatan, yaitu suatu niat baik dan kultur membangun kesehatan yang lebih baik.

Posyandu sebagai “organizing of change” mengembangkan fungsinya terkait dengan tantangan global kesehatan yang menuntut kecermatan dalam deteksi penyakit, sebagai

gerbang dalam menentukan skala prioritas kegiatannya. Posyandu diharapkan menjadi suatu mata rantai Puskesmas (FKTP) yang dapat menyerukan suara hati pelayanan di masyarakat, tidak bersandar kepada basis kegiatan blusukan di lapangan, namun proses pemanfaatan digitalisasi teknologi sudah saatnya dimulai dalam peran Posyandu sebagai “organizing of change”. Posyandu dapat mengelola sistem kerjanya secara otonom dan mandiri berdasarkan karakteristik kesehatan daerah kerjanya dan mengembangkan suatu upaya pengelolaan berkelanjutan untuk tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik. Misalnya di suatu area angka kesakitan usia lanjut cukup tinggi, pendekatan Posyandu yang dapat dikembangkan adalah pengelolaan maksimal usia lanjut di daerah tersebut, sejauh mana kualitas dan harapan hidupnya dapat ditingkatkan.

Menyikapi peran Posyandu sebagai mata rantai FKTP, sesungguhnya sistem JKN bergerak dari arus bawah (bottom up), dimana data dasar dan problematika penyakit di lapangan (desa) menjadi acuan dalam penyusunan rangkaian pembiayaan kesehatan di masyarakat. FKTP terutama ditingkat kecamatan / desa menjadi fasilitas yang tidak hanya bertumpu melaksanakan pelayanan kesehatan dalam konteks mengobati penyakit, namun dapat menjadi “organizing change” tahap kedua sebagai fungsi kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lokal, sehingga alokasi pembiayaan dapat dijalankan sesuai dengan fungsi dan karakteristik daerah. Fungsi kedua dari FKTP adalah sebagai pengurai rantai rantai sosial kesehatan yang terserak terkait dengan monitoring dan evakuasi penyakit terutama masyarakat di daerah terpencil / isolasi dengan memberdayakan tenaga posyandu selain sebagai tenaga promotif dan preventif, mengembangkan potensinya sebagai tenaga yang dapat berperan dalam *rapid, detect* dan *respond* terhadap permasalahan kesehatan yang ada di daerah isolasi bergandengan tangan dengan babinsa teritorial.

Mengkaji uraian diatas, menunjukkan bahwa peran posyandu tidak semata merupakan peran bersandarkan kuratif, namun dimensi dan perspektif yang lebih luas adalah membangun interelasi yang kuat dengan perspektif preventif dan promotif. Konsep yang dapat diajukan dalam tulisan ini secara filosofi, bagaimana peran posyandu ini menjadi suatu pisau positif bermata ganda yaitu menautkan sinergitas peran di masyarakat yang terkait dengan kesadaran dan kultur kesehatan sebagai bagian dari kehidupannya. Dengan demikian kondisi hulu dari sistem pelayanan kesehatan yang dipupuk, diharapkan menjadi salah satu faktor pereduksi kondisi penyakit yang terkait dengan komorbiditas, dan berdampak menurunnya morbiditas dan mortalitas, wacananya kualitas hidup sehat masyarakat akan meningkat.

**Kepustakaan:**

Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020. Kemenkes RI. 2021.

Lardo, S. (2020). *Posyandu sebagai Enterpreunership Kesehatan Bangsa*. Diakses dari <https://soroylardo.com/2019/03/26/posyandu-sebagai-entrepreneurship-kesehatan-bangsa/>

Nurhidayah, I. (2019). *Revitalisasi Posyandu melalui pemberdayaan Kader Kesehatan*. MKK, 2(2), 145-157.

Lardo, S (2020). *Membangu Pranata Pelayanan Rumah Sakit Rujukan*. PT Adfale Prima. 2021  
h.16-18